



PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA

Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Evaluasi MBG dan Penguatan Peran Strategis Perguruan Tinggi Indonesia

Penulis

Dwi Retno Hapsari¹, Surya Gentha Akmal², Muhammad Firdaus³, Epi Taufik⁴, Drajat Martianto⁵, Doni Yusri⁶

¹ Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University. Bogor, Indonesia

² Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, IPB University. Bogor, Indonesia

³ Departemen Ilmu Ekonomi, IPB University. Bogor Indonesia,

⁴ Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, IPB University. Bogor, Indonesia

⁵ Fakultas Kedokteran dan Gizi, IPB University. Bogor, Indonesia

⁶ Sekolah Vokasi IPB University. Bogor, Indonesia

Evaluasi MBG dan Penguatan Peran Strategis Perguruan Tinggi Indonesia

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Program MBG telah berkembang menjadi kebijakan strategis nasional dengan cakupan lebih dari 61 juta penerima manfaat.
- 2) Tantangan keamanan pangan, kualitas implementasi, dan ketimpangan kapasitas daerah masih menjadi isu utama.
- 3) Pendekatan MBG masih cenderung berorientasi distribusi pangan, belum sepenuhnya menjadi kebijakan gizi terintegrasi.
- 4) Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam penguatan rantai pasok, evaluasi dampak, pengembangan SDM, dan edukasi gizi.
- 5) Diperlukan model kolaborasi berbasis tridharma perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan MBG.

Diterima: 02 Juni 2026
Direvisi: 03 Juni 2026
Disetujui: 05 Juni 2026
Publikasi: 08 Juni 2026

Sitasi:

Hapsari DR, Akmal SG, Firdaus M, Taufik E, Martianto D, Yusri D, Astuti EW, Jayanegara A, Anggraeny B, Ramadhani NZ, Akmam N, Musarraff H, Lestari P, Hidayah RN, Wahyuni S.. 2026. Evaluasi MBG dan Penguatan Peran Strategis Perguruan Tinggi Indonesia. *Policy Brief Pertanian Kelautan dan Biosains Tropika*, 8(2), 1658-1665.



© 2026 The Author(s).
Published by IPB
University.

Ringkasan

Policy brief ini membahas perlunya penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai intervensi sosial strategis yang tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga pada pembangunan sistem pangan dan kebijakan gizi yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis *evidence*. Pelaksanaan MBG yang telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat masih menghadapi tantangan keamanan pangan, tata kelola kelembagaan, rantai pasok, komunikasi publik, serta ketimpangan kapasitas antarwilayah. Kondisi ini berpotensi memengaruhi mutu layanan, efektivitas anggaran, kepercayaan publik, dan keberlanjutan program. *Policy brief* ini menekankan pentingnya penguatan standar keamanan dan mutu pangan, pemanfaatan data untuk evaluasi program, serta pelibatan perguruan tinggi sebagai *knowledge producer*, evaluator independen, pusat inovasi, dan mitra strategis pemerintah. Dalam konteks tersebut, IPB University memiliki posisi penting dalam mendukung MBG melalui rekomendasi kebijakan berbasis *evidence-based policy* agar program ini berdampak nyata bagi pembangunan Indonesia.

Kata kunci: evaluasi kebijakan, ketahanan pangan, MBG, perguruan tinggi, sistem pangan

Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diimplementasikan secara nasional sejak tahun 2025 menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya diarahkan untuk menurunkan angka malnutrisi dan stunting, tetapi juga diproyeksikan sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, UMKM pangan, dan berbagai institusi pendukung lainnya. Dalam konteks global, kebijakan MBG sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 2: *Zero Hunger*, yang menargetkan penghapusan kelaparan, peningkatan ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, dan pengembangan sistem pangan berkelanjutan pada tahun 2030 (FAO, 2023). Selain itu, dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, MBG ditetapkan sebagai salah satu strategi prioritas pemerintah dalam penguatan ketahanan pangan dan pembangunan sumber daya manusia nasional (Kemenkeu, 2025).

Setelah satu tahun implementasi, pelaksanaan Program MBG mulai menunjukkan berbagai capaian sekaligus tantangan di lapangan. Di satu sisi, program ini dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi, memperluas pasar produk pangan lokal, serta memperkuat rantai pasok pangan domestik. Data Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa hingga 9 Mei 2026 program MBG telah menjangkau 61.962.732 penerima manfaat, melibatkan 28.390 dapur SPPG, serta menyerap lebih dari 1,2 juta tenaga kerja (BGN, 2026). Beberapa daerah juga mulai merasakan dampak ekonomi dari meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk mendukung operasional MBG. Namun di sisi lain, berbagai kritik dan kekhawatiran turut muncul di ruang publik, mulai dari aspek kesiapan infrastruktur, tata kelola distribusi pangan, keamanan dan kualitas makanan, efisiensi anggaran, keberlanjutan pasokan bahan baku, hingga kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung

pelaksanaan program secara masif dan berkelanjutan. Tantangan keamanan pangan juga menjadi perhatian serius, terutama setelah munculnya kasus keracunan pangan pada pelaksanaan MBG di sejumlah daerah (BGN, 2026). Selain itu, muncul pertanyaan mengenai efektivitas program dalam menjawab persoalan gizi secara komprehensif apabila tidak dibarengi dengan edukasi pangan, penguatan data penerima manfaat, dan sistem monitoring evaluasi yang baik.

Dalam perkembangannya, perguruan tinggi mulai dipandang sebagai salah satu aktor strategis yang dapat terlibat dalam mendukung implementasi Program MBG. Perguruan tinggi memiliki kapasitas dalam bidang riset, inovasi teknologi pangan, penguatan sistem logistik dan rantai pasok, pengembangan model pemberdayaan masyarakat, hingga penyediaan rekomendasi kebijakan berbasis *evidence* (Firdaus, 2026). Selain itu, keterlibatan perguruan tinggi juga dapat mendukung pengawasan mutu pangan, edukasi gizi, pengembangan produk pangan lokal, serta penguatan tata kelola program yang lebih akuntabel dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, wacana keterlibatan kampus, termasuk melalui pembangunan dapur MBG di lingkungan perguruan tinggi, mulai memunculkan berbagai respons di masyarakat. Sebagian pihak memandang langkah tersebut sebagai peluang strategis untuk memperkuat kontribusi akademik terhadap persoalan nasional, sementara sebagian lainnya menilai perlunya kajian yang lebih mendalam terkait urgensi, kesiapan, tata kelola, dan dampaknya terhadap fungsi utama perguruan tinggi. Peran ideal perguruan tinggi berada pada penguatan tridharma melalui penelitian, pengembangan SDM, evaluasi independen, penguatan sistem pangan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan, bukan pada keterlibatan operasional langsung dalam pengelolaan SPPG (Martianto, 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian untuk memetakan peluang dan tantangan keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung keberlanjutan program MBG. Kajian ini penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan

berbasis *evidence* yang tidak hanya menilai capaian program dari aspek gizi dan ketahanan pangan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi tata kelola, kesiapan infrastruktur, efisiensi pembiayaan, penguatan ekonomi lokal, serta dampaknya terhadap ekosistem pendidikan tinggi. Policy brief ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan arah pengembangan Program MBG ke depan agar lebih efektif, akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung pencapaian pemenuhan pangan dan gizi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

MBG sebagai Intervensi Strategis Pembangunan Nasional

Kondisi empiris menunjukkan bahwa kebijakan agroindustri di Indonesia masih dijalankan secara terpisah, di mana kebijakan pangan, air, dan energi dirumuskan serta diimplementasikan terpisah. Pola fragmentasi ini bukan fenomena unik Indonesia, studi di berbagai negara menunjukkan bahwa keputusan untuk lahan, air, energi, dan pertanian juga memiliki kelemahan harmonisasi institusional yang menghambat integrasi kebijakan.

Contoh konkret disajikan pada kasus produksi gula di agroindustri. Kementerian Pertanian menetapkan target peningkatan kapasitas produksi pabrik gula nasional, namun alokasi air untuk proses pengolahan tebu di kawasan industri tidak terkoordinasi dengan pengelolaan daerah aliran sungai yang diatur oleh Kementerian PUPR. Pada saat bersamaan, kebijakan tarif energi industri dari Kementerian ESDM meningkatkan biaya operasional pabrik pengolahan tanpa mempertimbangkan target swasembada gula. Ketiga kebijakan ini berjalan paralel tanpa mekanisme yang menyelaraskan trade-off antar ketiganya.

Agroindustri biodiesel juga menghadapi problematika yang sama. Target peningkatan kapasitas pengolahan *crude palm oil* (CPO) untuk

biodiesel memerlukan pasokan air dalam volume besar untuk proses *refinery*, namun alokasi air industri tidak terkoordinasi dengan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan Kementerian PUPR. Sementara itu, kebijakan energi terbaru dari Kementerian ESDM mendorong percepatan produksi biodiesel tanpa evaluasi terhadap dampaknya pada ketersediaan air dan beban lingkungan di kawasan agroindustri. Kebijakan ini ditetapkan tanpa mekanisme evaluasi dampak lintas sektor.

Temuan berbagai studi menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya data atau teknologi, melainkan pada ketiadaan kerangka kebijakan yang secara eksplisit mengelola *trade-off* antar tujuan. Review sistematis terhadap alat-alat Nexus menunjukkan keterbatasan pada integrasi model dan kebutuhan untuk alat yang mendukung pembuatan kebijakan terpadu yang mampu menangkap sinergi, *trade-off*, dan keterkaitan *governance* (Kaddoura & El Khatib, 2017). Sharmina *et al.* (2016) melakukan kajian perihal kasus kebijakan penggunaan lahan di Inggris yang mengilustrasikan bagaimana kebijakan yang terfragmentasi menimbulkan ketidaksesuaian tujuan dan diperlukan suatu pendekatan terintegrasi yang menggabungkan pemodelan dengan proses *stakeholder governance*.

Tantangan Implementasi MBG

Beberapa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial paling ambisius dalam sejarah kebijakan publik Indonesia modern. Diluncurkan pada awal tahun 2025, program ini memadukan berbagai tujuan strategis sekaligus, mulai dari perbaikan status gizi masyarakat, penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan, hingga pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas. Dengan cakupan lebih dari 41,9 juta penerima manfaat serta anggaran mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026, MBG tidak hanya mencerminkan skala intervensi yang besar, tetapi juga kompleksitas tata kelola yang tinggi (BGN, 2026; Kemenkeu, 2025). Skala anggaran ini menunjukkan bahwa MBG merupakan investasi publik yang sangat besar, sehingga ukuran keberhasilannya tidak cukup

hanya dilihat dari jumlah penerima manfaat atau jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap status gizi, kualitas pembelajaran, keamanan pangan, dan penguatan ekonomi lokal.

Dalam kerangka akademik, MBG perlu dipahami sebagai instrumen kebijakan multidimensi yang beroperasi pada irisan antara *nutrition policy*, *food system transformation*, dan *human capital investment*. Dalam praktik internasional, keberhasilan intervensi berskala besar seperti MBG ini umumnya didukung oleh kualitas desain kebijakan, integrasi lintas sektor, serta kapasitas tata kelola yang adaptif dan berbasis *evidence* (FAO, 2023; World Bank, 2024). MBG perlu bergeser dari *feeding program* menjadi *nutrition-sensitive integrated policy*. Artinya, penyediaan makanan harus dihubungkan dengan edukasi gizi, sanitasi, pelayanan kesehatan dasar, perubahan perilaku konsumsi, dan penguatan sistem pangan lokal agar dampaknya tidak berhenti pada pemenuhan kalori jangka pendek (Akmal, 2026).

Dalam kerangka sistem pangan, MBG memiliki potensi besar sebagai policy leverage point untuk mendorong transformasi struktural. Namun potensi ini hanya dapat diwujudkan jika program dirancang untuk memperkuat rantai pasok lokal, mendorong inklusi pelaku kecil, serta mengurangi ketergantungan pada pemasok besar. Tanpa strategi tersebut, MBG justru berisiko menciptakan distorsi pasar, meningkatkan ketimpangan, dan melemahkan ketahanan pangan lokal. Oleh karena itu, pendekatan *short food supply chain*, *local procurement*, dan *inclusive value chain* menjadi krusial dalam desain kebijakan (Firdaus, 2026; OECD-FAO, 2016).

Kerangka Keputusan Terpadu

Keamanan Pangan dan Standarisasi

Tantangan paling serius dalam implementasi MBG adalah keamanan pangan. Tingginya jumlah kasus keracunan pangan menunjukkan masih lemahnya penerapan standar higiene dan sanitasi, pengawasan kualitas pangan, serta kapasitas SDM di tingkat operasional. Materi Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa per 9 Mei 2026, terdapat 27.110 anak mengalami keracunan rawat jalan atau 0,043% dari total penerima manfaat dan 0,00034% dari total porsi. Selain itu, terdapat 2.303 anak mengalami keracunan rawat inap atau 0,0037% dari

total penerima manfaat dan 0,00003% dari total porsi (BGN, 2026). Walaupun persentasenya kecil terhadap total porsi, jumlah absolut korban tetap besar dan memerlukan perbaikan sistemik karena berkaitan langsung dengan keselamatan anak dan kepercayaan publik.

Data lain menunjukkan bahwa baru 11.938 SPPG yang memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), atau sekitar 44% dari total SPPG operasional (BGN 2026). BGN juga mencatat adanya SPPG yang memperoleh Surat Peringatan karena infrastruktur belum memenuhi standar, belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan belum dilakukan pendaftaran SLHS. Hal ini memperlihatkan bahwa penguatan keamanan pangan harus menjadi agenda prioritas, tidak hanya melalui inspeksi, tetapi juga melalui pelatihan, sertifikasi, pendampingan, dan sistem peringatan dini.

Ketimpangan Kapasitas Antarwilayah

Pelaksanaan MBG di Indonesia menghadapi tantangan geografis dan sosial yang sangat beragam. Wilayah terpencil, kepulauan, dan daerah defisit pangan memiliki tantangan logistik yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan. BGN mencatat bahwa sasaran SPPG terpencil tersebar di 36 provinsi dengan target 8.617 SPPG terpencil. Dari jumlah tersebut, 1.455 SPPG telah selesai dibangun, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pembangunan (BGN, 2026). Data ini menunjukkan bahwa implementasi MBG memerlukan pendekatan yang adaptif, terutama untuk daerah kepulauan, wilayah 3T, dan daerah dengan keterbatasan infrastruktur pangan.

Tantangan rantai pasok MBG pada wilayah dengan topografi dan budaya yang berbeda, wilayah defisit pangan, wilayah kepulauan, serta karakter produk pangan yang bersifat *perishable* (Firdaus, 2026). Oleh karena itu, kebijakan yang terlalu seragam berisiko tidak mampu menjawab kebutuhan spesifik daerah. Daerah perlu memperoleh ruang kewenangan implementatif yang memadai, terutama dalam penguatan pasokan lokal, penyesuaian menu, sistem distribusi, dan pengawasan kualitas.

Pendekatan yang Masih Berorientasi Distribusi

MBG masih cenderung diposisikan sebagai *feeding program* dibandingkan *nutrition-sensitive*

policy. Padahal, perbaikan status gizi tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan, tetapi juga edukasi gizi, perubahan perilaku konsumsi, sanitasi, dan komunikasi publik yang efektif. MBG bukan sekadar urusan logistik, melainkan intervensi pembangunan strategis yang harus dipahami sebagai inovasi sosial (Hapsari, 2026).

Dalam perspektif komunikasi pembangunan, pendekatan linier dan *top-down* dapat menempatkan masyarakat hanya sebagai objek penerima bantuan. Kondisi ini berisiko memunculkan resistensi publik, terutama ketika terjadi persoalan kualitas makanan, distribusi, keamanan pangan, atau beban tambahan bagi sekolah dan kampus. Oleh karena itu, MBG memerlukan pendekatan komunikasi dialogis yang partisipatif, transparan, kontekstual, berbasis *evidence*, dan konsisten (Hapsari, 2026).

Resistensi dan Komunikasi Publik

Beberapa resistensi publik terhadap MBG muncul akibat kurangnya komunikasi dialogis dan partisipatif. Resistensi bukan selalu bentuk penolakan, tetapi dapat menjadi sinyal adanya kekhawatiran, ketidakpercayaan, atau masalah implementasi. Dengan demikian, resistensi harus dibaca sebagai data sosial untuk memperbaiki tata kelola, bukan semata sebagai persoalan hubungan masyarakat (Hapsari, 2026).

Strategi komunikasi MBG perlu mengadopsi kerangka *Social and Behavior Change Communication* (SBCC), yaitu komunikasi yang tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga mengubah pengetahuan menjadi tindakan nyata di tingkat rumah tangga, sekolah, dan komunitas. Materi narasumber juga menekankan empat komponen edukasi gizi masyarakat, yaitu pesan yang sederhana tentang gizi seimbang dan keamanan pangan, kanal komunikasi multi-jalur, pelibatan aktor lokal seperti guru, orang tua, tenaga kesehatan, kader, tokoh lokal, dan mahasiswa, serta penyesuaian materi dengan konteks budaya pangan setempat (Hapsari, 2026).

Potensi Peran Perguruan Tinggi dalam MBG

Pendekatan Proyeksi peran keterlibatan perguruan tinggi dalam program MBG. Mengakar

kepada undang-undang 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi terutama Pasal 5 - 13 menetapkan bahwa peran dasar perguruan tinggi (PT) memiliki fungsi, tujuan dan mandat Tridharma yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut dan mandat tridharma, terdapat empat peran ideal perguruan tinggi dalam MBG, yaitu:

Knowledge Producer

Peran pertama perguruan tinggi adalah sebagai *Knowledge Producer*. Dalam posisi ini, perguruan tinggi dapat menjadi *Research and innovation hub* atau pusat riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan MBG. Misalnya, melalui penelitian tentang menu pangan lokal bergizi, keamanan pangan, teknologi pengolahan makanan, inovasi biofortifikasi, sistem logistik, hingga penguatan rantai pasok pangan daerah. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat berkontribusi pada penyusunan materi komunikasi publik berbasis data dan ilmu pengetahuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya gizi seimbang, keamanan pangan, dan pola konsumsi sehat (Firdaus, 2026). Selanjutnya, Perguruan tinggi juga dapat mengelola pengetahuan melalui dokumentasi praktik baik, penyusunan bahan pembelajaran, serta pengembangan platform berbagi informasi agar pengalaman dari satu daerah dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain (Martianto, 2026).

Policy Advisor

Peran kedua, perguruan tinggi dapat berperan sebagai *Policy Advisor*. Dalam kapasitas ini, perguruan tinggi berfungsi sebagai policy think tank yang menyediakan rekomendasi kebijakan, *policy brief*, pedoman teknis, dan standar implementasi bagi kementerian maupun lembaga terkait. Dukungan akademik ini penting mengingat MBG merupakan kebijakan multidimensi yang membutuhkan integrasi antara sektor pangan, kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan ekonomi lokal (Hapsari 2026). Perguruan tinggi juga memiliki peran penting sebagai penjaga etika dan keselamatan melalui penyusunan SOP keamanan pangan, standar higiene dan sanitasi, serta pedoman etik implementasi program untuk meminimalkan risiko keamanan pangan dan menjaga kualitas layanan.

Selain itu, perguruan tinggi dapat mengembangkan pendekatan sistem terintegrasi yang menghubungkan berbagai sektor secara holistik sehingga MBG tidak hanya berfungsi sebagai program distribusi makanan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sistem pangan dan pembangunan manusia yang berkelanjutan (Firdaus, 2026).

Capacity Builder

Peran ketiga adalah sebagai *Capacity Builder*. Program MBG membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam jumlah besar, terutama untuk memastikan standar gizi, keamanan pangan, pengelolaan dapur, distribusi, dan pemantauan program dapat berjalan dengan baik. Peran ini dapat diwujudkan melalui penyusunan kurikulum dan modul pelatihan, pengembangan sistem pelatihan berjenjang, pelaksanaan *training of trainers*, hingga penyediaan fasilitas praktik seperti *training kitchen* untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam ekosistem MBG. Perguruan tinggi juga dapat membangun *talent pipeline* dengan menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang pangan, gizi, keamanan pangan, logistik, dan pengelolaan sistem pangan berbasis komunitas. Kontribusi ini menjadi sangat penting mengingat implementasi MBG membutuhkan tenaga profesional dalam jumlah besar dengan kapasitas yang terstandarisasi di berbagai daerah Indonesia (Martianto, 2026).

Independent Evaluator

Keempat, perguruan tinggi berperan sebagai Independent Evaluator. Sebagai institusi akademik yang independen, perguruan tinggi dapat memimpin pelaksanaan evaluasi berbasis metode ilmiah terhadap dampak MBG, baik dari aspek gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal, maupun efektivitas biaya program. Perguruan tinggi juga dapat mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang transparan dan akuntabel, termasuk pengumpulan data *baseline*, *midline*, dan *endline*, pengukuran dampak status gizi, evaluasi keamanan pangan, hingga analisis efisiensi investasi berbasis *nutrition outcome*. Peran evaluatif ini sangat penting agar keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau

jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi dari dampak nyata terhadap kualitas hidup dan pembangunan modal manusia Indonesia (Hapsari, 2026).

Dengan demikian, keterlibatan perguruan tinggi sebaiknya mengarah pada penguatan fungsi akademik strategis. Pendekatan ini akan memperkuat kualitas tata kelola Program MBG sekaligus memastikan bahwa program berjalan secara aman, efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia serta pencapaian SDG 2: *Zero Hunger*.

Rekomendasi

Pemerintah perlu menggeser pendekatan MBG dari sekadar *feeding program* menjadi *nutrition-sensitive integrated policy* yang mengintegrasikan aspek gizi, kesehatan, sanitasi, edukasi, perubahan perilaku, dan sistem pangan lokal. Ukuran keberhasilan MBG tidak cukup hanya jumlah penerima manfaat atau jumlah porsi makanan, tetapi perlu diarahkan pada *cost per nutrition outcome*, perubahan status gizi, peningkatan kualitas pembelajaran, keamanan pangan, dan penguatan ekonomi lokal.

BGN bersama kementerian/lembaga terkait perlu memperkuat standar keamanan pangan melalui peningkatan kapasitas SDM, sertifikasi hygiene sanitasi, pengawasan kualitas pangan, dan penguatan SOP nasional untuk seluruh SPPG. Mengingat baru sekitar 44% SPPG operasional yang memiliki SLHS dan masih adanya kasus keracunan pangan, BGN perlu menetapkan target percepatan sertifikasi SLHS, audit berkala, sistem pelaporan insiden pangan, serta mekanisme *corrective action* yang transparan.

Bappenas bersama BGN perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis *outcome* melalui desain *baseline*, *midline*, dan *endline* yang melibatkan perguruan tinggi sebagai evaluator independen. Evaluasi perlu mencakup indikator status gizi, kehadiran dan konsentrasi siswa, keamanan pangan, efektivitas biaya, dampak ekonomi lokal, kepuasan penerima manfaat, dan kualitas tata kelola daerah.

Pemerintah daerah perlu diberi ruang kewenangan implementatif yang lebih adaptif dalam pelaksanaan MBG, terutama untuk penyesuaian menu berbasis pangan lokal, desain rantai pasok, distribusi wilayah terpencil, dan pengawasan kualitas. Desentralisasi bukan berarti melepas kendali pusat, tetapi memberikan fleksibilitas pelaksanaan agar kebijakan nasional dapat sesuai dengan kondisi geografis, budaya pangan, dan kapasitas daerah.

Pemerintah perlu memperkuat pendekatan *short food supply chain* dan *local procurement* untuk meningkatkan keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM pangan lokal. Skema *closed-loop* dapat dikembangkan melalui integrasi pendampingan petani, pembiayaan KUR, digital monitoring, penguatan koperasi, pengumpulan hasil, dan pembelian oleh SPPG. Dengan demikian, MBG dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi lokal sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Perguruan tinggi perlu dilibatkan secara sistematis melalui mandat tridharma, bukan melalui keterlibatan operasional langsung dalam pengelolaan SPPG. Peran perguruan tinggi diarahkan pada penelitian, inovasi, pengembangan SDM, pelatihan, penjaminan mutu, evaluasi independen, edukasi gizi, komunikasi publik, dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

IPB University dapat dikembangkan sebagai *Center of Excellence* MBG nasional, khususnya pada bidang sistem pangan, keamanan pangan, rantai pasok pertanian, peternakan dan perikanan, komunikasi pembangunan, gizi masyarakat, evaluasi kebijakan, serta pengembangan model kolaborasi kampus-daerah. Model ini dapat direplikasi oleh perguruan tinggi lain sesuai keunggulan masing-masing wilayah.

Strategi komunikasi publik MBG perlu diubah menjadi lebih dialogis, transparan, partisipatif, dan berbasis konteks lokal. Pemerintah perlu menyediakan kanal pengaduan aktif, data terbuka tentang mutu dan keamanan pangan, serta narasi komunikasi yang konsisten antar lembaga. Edukasi gizi harus bergerak melampaui penyebaran informasi menuju perubahan pemahaman, kebiasaan, dan norma sosial baru tentang pangan bergizi.

BGN, Bappenas, dan perguruan tinggi perlu membentuk mekanisme kolaborasi permanen berupa forum pengetahuan MBG nasional. Forum ini dapat berfungsi untuk mendokumentasikan praktik baik, menyusun *lesson learned*, mengembangkan modul pelatihan, menyusun standarisasi evaluasi, serta menyediakan policy brief berkala sebagai masukan kebijakan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa penguatan MBG tetap berada dalam kerangka keselamatan, etika, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan pembangunan. Jika ditemukan persoalan serius pada aspek keamanan pangan, distribusi, atau penerimaan publik, mekanisme evaluasi harus memungkinkan perbaikan desain, penghentian sementara pada titik bermasalah, dan penataan ulang pelaksanaan secara objektif demi keselamatan masyarakat.

Kesimpulan

Kebijakan Program MBG merupakan kebijakan strategis nasional yang memiliki potensi besar dalam memperbaiki status gizi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun demikian, hasil evaluasi tahun pertama menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, keamanan pangan, penguatan sistem pangan lokal, komunikasi publik, dan kapasitas implementasi di daerah.

Pendekatan implementasi yang masih berorientasi pada output distribusi pangan perlu diperkuat menjadi kebijakan gizi terintegrasi berbasis *evidence-based policy*. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai pusat pengetahuan, inovasi, evaluasi independen, dan penguatan kapasitas nasional.

IPB University, dengan kekuatan multidisiplin pada bidang pangan, pertanian, peternakan, perikanan, ekonomi, komunikasi pembangunan, dan gizi, memiliki potensi besar untuk menjadi *Center of Excellence* dalam mendukung penguatan kebijakan dan implementasi MBG di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi

menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas Program MBG sebagai investasi jangka panjang pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Adetama, D. S., Fauzi, A., Juanda, B., & Hakim, D. B. (2022). A policy framework and prediction on low carbon development in the agricultural sector in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(7), 2209–2219.
<https://doi.org/10.18280/ijstdp.170721>
- Akmal, S. G. (2026). Evaluasi MBG dan transformasi kebijakan gizi berbasis sistem pangan. IPB University.
- Badan Gizi Nasional. (2026). Resume pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan perkembangan SPPG tahun 2025–2026.
- Food and Agriculture Organization. (2023). School food and nutrition framework.
- Firdaus, M. (2026). Ekosistem rantai pasok MBG: Urgensi dan usulan pendekatan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University.
- Hapsari, D. R. (2026). Transformasi Makan Bergizi Gratis (MBG): Membangun inovasi sosial dan komunikasi pembangunan berkeadilan untuk ketahanan pangan nasional. IPB University.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Nota keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2026.
- Martianto, D. (2026). Peran perguruan tinggi dalam penguatan Program Makan Bergizi Gratis. IPB University.
- OECD & Food and Agriculture Organization. (2016). OECD-FAO guidance for responsible agricultural supply chains. OECD Publishing.
- World Bank. (2024). Nutrition and human capital development report. Wihardja, M. M., Arifin, B., & Amir, M. F. (2023). *Towards more sustainable agro-food systems in Indonesia*. Center of Policy Studie



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Dwi Retno Hapsari, merupakan dosen pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. Bidang keahliannya mencakup komunikasi pembangunan, komunikasi penyuluhan, pengembangan masyarakat, serta kajian sosial yang mendukung penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat.
Email: retnokpm@apps.ipb.ac.id



Surya Genta Akmal, merupakan dosen pada Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. Bidang keahliannya mencakup zoologi terapan, biologi perikanan, biodiversitas akuatik, serta pengelolaan sumber daya perairan secara berkelanjutan.
Email: surya.genta@apps.ipb.ac.id



Muhammad Firdaus, merupakan Guru Besar pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University. Bidang keahliannya mencakup ekonomi pertanian, ekonomi pembangunan, analisis kebijakan, serta kajian ekonomi yang berkaitan dengan tata kelola pangan dan pembangunan nasional.
Email: mfirdaus@apps.ipb.ac.id



Epi Taufik, merupakan Guru Besar pada Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, IPB University. Bidang keahliannya mencakup ilmu dan teknologi susu, produksi ternak perah, keamanan pangan asal hewan, serta pengembangan produk peternakan yang mendukung kesehatan masyarakat.
Email: epitaufik@apps.ipb.ac.id



Drajat Martianto, merupakan Guru Besar bidang kebijakan pangan dan gizi pada Fakultas Kedokteran dan Gizi, IPB University. Bidang keahliannya mencakup gizi masyarakat, kebijakan pangan dan gizi, ketahanan pangan, serta perumusan strategi peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Email: dmartianto@apps.ipb.ac.id



Doni Yusri, merupakan dosen pada Program Studi Manajemen Industri, Sekolah Vokasi IPB University. Bidang keahliannya mencakup manajemen industri, manajemen produksi kolaboratif, penguatan kapasitas kelembagaan, serta tata kelola program berbasis pengembangan sumber daya dan inovasi.
Email: doniyusri@apps.ipb.ac.id

ISSN 2828-285X



Telepon

+62 811-1183-7330



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680